

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN
PEMBUKAAN MUSRENBANG PENYUSUNAN RKPD DIY 2020
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2019

Pada hari Kamis tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Ballroom Hotel Eastparc Yogyakarta telah diselenggarakan Pembukaan Musrenbang RKPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan pada acara pembukaan musrenbang RKPD yang disampaikan oleh :
 - 1). Gubernur DIY;
2. Pemaparan materi yang disampaikan oleh:
 - 1). Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri;
 - 2). Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/ Bappenas
 - 3). Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial RI
 - 4). Ketua Forum CSR DIY
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPD terhadap materi yang dipaparkan, maka pada:

Hari dan Tanggal	: Kamis, 11 April 2019
Jam	: 08.30 s.d selesai
Tempat	: Ballroom Hotel Eastparc Yogyakarta

seluruh peserta musrenbang RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta

MENYEPAKATI

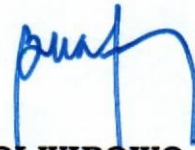
- KESATU** : sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini.
- KEDUA** : paparan, tanggapan dan saran terkait program dan kegiatan Rancangan RKPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 yang terangkum dalam notulensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.
- KETIGA** : rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 untuk

dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.


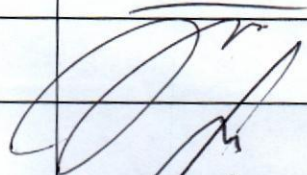
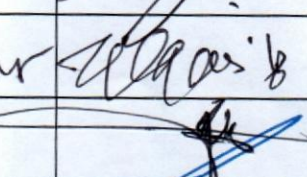
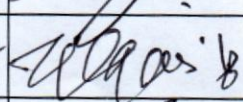
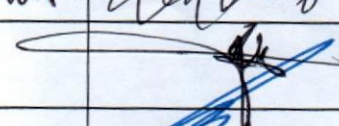

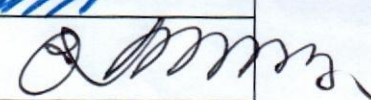
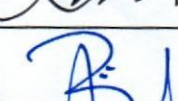

Yogyakarta, 11 April 2019

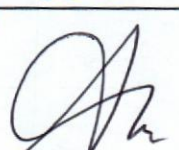
Kepala Bappeda DIY selaku
pimpinan sidang musrenbang
RKPD Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2020



BUDI WIBOWO, S.H.,M.M
NIP. 19610127 198503 1 006

Mewakili peserta musrenbang RKPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2020

NO	Nama	Lembaga/instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.	Subaryu	Parompan		
2.	Umar P	Jaki		
3.	Sumadi	Slaman		
4.	Wahyudi Karmahomus	MAP-UTM	Bulaksumur	
5.	Timbul Wilyono	Dewan Pendidikan Desa		
6.	Asep Lanteng	BAPPEDA IK	Wotus	
8.	SRI SUHARTATA	BAPPEDA GK GK		
9.	Bob Sugi	Bangs	Jakarta	
10.	Anyam	Bppm	Glut	

11. Asep Sugiudin Otd Bappenas Jakr 

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD PEMERINTAH DAERAH DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020
 NOMOR : TANGGAL :

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RKPD PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020

No	Sasaran	Target Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM: 81,08	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 70.12	
2	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Indeks Gini : 0,3776	
		% Angka Kemiskinan : 9,11	
3	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	% peningkatan jumlah budaya benda tak benda yang diapresiasi: 11,72	
4	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah.	Indeks williamson: 0,4524	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah
5	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan
		IKLH: 62,44	
		% Kesesuaian Pemanfaatan Ruang : 79,5	
		% Kesesuaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan: 40,69	

No	Sasaran	Target Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah
6	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK: WTP	Pendukung Prioritas Pembangunan
		Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	
7	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	% Capaian Program Urusan Keistimewaan: 82,61	
8	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan : 13.419	

NOTULENSI MUSRENBANG RKPD DIY 2020

1. Kegiatan : Musrenbang RKPD DIY 2020
Hari dan Tanggal : Kamis, 11 April 2019
Jam : 08.30 s.d selesai
Tempat : Ballroom Hotel Eastparc Yogyakarta
2. Peserta : (terlampir dalam daftar hadir)
3. Ringkasan Paparan Sekretaris Daerah DIY
 - Progress Penyusunan RKPD DIY 2020
Dimulai pada 4 Desember 2018 dengan pelaksanaan *kick off meeting* RKPD DIY 2020. Penyusunan rancangan awal pada minggu kedua bulan Februari 2019, kemudian penyusunan rancangan pada minggu pertama Maret 2019 sampai dengan minggu pertama April 2019. Saat ini adalah pelaksanaan Musrenbang.
 - Tema RKPD DIY 2020 dan Prioritas Nasional RKP 2020
Tema RKPD 2010 Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas. Kata kuncinya adalah infrastruktur dan SDM.

Permasalahan pokok pembangunan DIY: (1) disparitas indeks pembangunan manusia; (2) kemiskinan dan ketimpangan pendapatan; (3) ketimpangan antar wilayah; dan (4) keterbatasan kemampuan pembiayaan keuangan.

Dari permasalahan tersebut diusulkan prioritas provinsi yaitu (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan; (2) Penguatan konektivitas dan pemerataan wilayah; (3) Aktivitas perekonomian yang berkelanjutan; dan (4) Pendukung prioritas pembangunan. Prioritas tersebut dijabarkan ke dalam 13 strategi.
 - Sinkronisasi Provinsi & Kabupaten Kota: Arahkan Kewilayahan dan Tematik Pembangunan
Tema RKP 2020: Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas. Dengan prioritas nasional: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Penguatan Konektivitas dan Pemerataan; (3) Pemantapan ketahanan pangan, air, energi dan pelestarian lingkungan hidup; (4) Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja; dan (5) Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Tema RKPD DIY 2020: Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitas. Kegiatan Lintas Sektor dalam RKPD DIY 2020. Dengan prioritas provinsi: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Berkelanjutan; (2) Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah; (3) Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan; dan (4) Pendukung Prioritas Pembangunan.

Sasaran dan prioritas pembangunan DIY berfokus pada pembangunan berkelanjutan serta pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.

Arahan Tematik RPJMD DIY : (1) Peningkatan Pendapatan dan pengurangan kemiskinan; (2) Pengurangan ketimpangan wilayah; (3) Respon terhadap Pembangunan Yogyakarta International Airport; dan (4) Pembiayaan Pembangunan.

- Proporsi usulan tematik Perangkat Daerah DIY terbesar adalah pengurangan Ketimpangan Wilayah (50 persen) dan terendah adalah Pembiayaan Pembangunan (dibawah 1 persen).
- Proporsi program/kegiatan Kabupaten/Kota yang mendukung Program/Kegiatan tematik Pemda DIY terbesar adalah Pengurangan Ketimpangan Wilayah (56 persen) dan terendah Pembiayaan Pembangunan (dibawah 1persen)

4. Ringkasan Sambutan Wakil Gubernur DIY

- Sebagaimana tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan masa depan. Hal itu dilakukan melalui urutan pilihan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
- Perencanaan pembangunan adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menumbuhkan kualitas daya saing daerah; melalui pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.
- Dalam Konteks DIY, permasalahan yang masih menjadi tantangan bersama diantaranya terkait dengan penuntasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan. Walaupun prosentase kemiskinan sudah mengalami penurunan dari 12,13% ditahun 2017 menjadi 11,81% ditahun 2018, tetapi daya ungkit penurunan itu perlu ditingkatkan melalui dukungan yang terintegrasi.
- Terkait ketimpangan, baik dari sisi wilayah maupun aspek pendapatan masyarakat, yang menunjukkan masih berada pada parameter cukup timpang, walaupun peningkatan pendapatan di tingkat masyarakat golongan menengah ke bawah sudah bergeliat, namun tingkat pertumbuhannya belum dapat menyamai pencapaian pada masyarakat yang berpendapatan tinggi.

5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri;

- Tema RKPD 2020 DIY sudah selaras dengan tema RKP 2020. Namun demikian juga harus selaras dengan rencana pembangunan wilayah Jawa-Bali, RPJMD dan rencana tata ruang.

- Tema Pembangunan Wilayah Jawa-Bali yaitu: Pendorong industri, pariwisata, perdagangan serta pangan nasional berkelanjutan.
- Pertumbuhan ekonomi DIY pada 2018 adalah sebesar 6,2 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang sebesar 5,17 persen. Akan tetapi tingkat kemiskinan di DIY masih relatif tinggi yaitu sebesar 11,81 persen atau di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,66 persen. Hal ini perlu dijadikan perhatian dalam RKPD 2020.
- Struktur ekonomi DIY pada tahun 2018, didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu: Industri Pengolahan (12,99 persen), Konstruksi (10,28 persen), dan Akomodasi, Makan dan Minum (10,22 persen).
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY tahun 2018 mencapai (3,35 persen) berada di bawah rata-rata Nasional (5,34 persen). Berdasarkan trend selama 2014-2018, TPT cenderung mengalami penurunan dan di bawah rata-rata Nasional. Namun perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut karena TPT lulusan D4/S1 cukup tinggi bila dibandingkan lulusan SMA/SMK/ sederajat.
- Selama tahun 2013-2017, DIY memperoleh opini WTP dari BPK.
- Alokasi anggaran fungsi Pendidikan pada APBD DIY Tahun 2019, mencapai Rp. 1,93 triliun atau 32,63 persen dari total belanja. Rasio Anggaran tersebut berada di atas rata-rata Nasional dan ada di peringkat 19.
- Alokasi anggaran fungsi Kesehatan pada APBD DIY Tahun 2019, mencapai Rp. 0,35 triliun atau 15,27 persen dari total belanja. Meskipun nominal anggarannya berada di peringkat ke 27, namun rasio terhadap total anggarannya sudah cukup besar dan berada di peringkat 3, di atas rata-rata Nasional.
- Pada Tahun 2018 kepesertaan BPJS Kesehatan (JKN-KIS) 3,4 juta jiwa dari 3,6 juta jumlah penduduk DIY atau 94 persen. Dua Kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta yang menjadi prioritas dalam penurunan Stunting adalah: Kab. Kulonprogo dan Kab. Gunungkidul.
- Kebijakan bantuan pendanaan kelurahan: dialokasikan untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten/kota. dihitung berdasarkan 3 (tiga) kategori kinerja pelayanan dasar publik, yaitu kategori baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

6. Ringkasan Paparan Panel

- a. Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Bappenas
 - IPM di DIY lebih baik dibandingkan IPM nasional. Namun, laju pertumbuhan IPM menurun pada tahun 2017 Begitu juga untuk IPM kabupaten/kota sebagian besar di atas rata-rata nasional, kecuali Kabupaten Gunung Kidul. Angka IPM tertinggi berada di Kota Yogyakarta.

- Alokasi Dana Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan hingga lima kali lipat dari tahun 2013 hingga 2019. Diharapkan penyerapan pada akhir tahun 2019 dapat mendekati 90 persen.
- Hasil Rekapitulasi Rakortekrenbang: Usulan yang Diajukan OPD Provinsi sebanyak 511 usulan, dengan sebanyak 87,7 persen usulan telah diverifikasi Bappeda provinsi.
- Terdapat ruang yang luas bagi DIY bagi pemanfaatan DAK, terutama berkaitan dengan tema RKPD. Arahkan DAK fisik DIY adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan kualitas SDM melalui dukungan DAK Pendidikan dan Kesehatan; (2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan peningkatan konektivitas wilayah melalui dukungan DAK Fisik Jalan dan Transportasi Perdesaan; (3) Perbaikan mekanisme dan sistem pendataan melalui dukungan DAK Sosial; dan (4) Peningkatan Produktivitas Pertanian melalui dukungan DAK Pertanian.
- DIY merupakan salah satu provinsi yang menetapkan rencana aksi daerah (RAD) melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

b. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial RI

- UU No. 11/ 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- Ditekankan lagi dengan UU No. 13/ 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin: Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program & kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.
- Sasaran strategis untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan dengan (1) Berkontribusi menurunkan jumlah Penduduk Miskin dan Rentan dan (2) Sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional.
- Strategi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan secara mikro adalah dengan menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan (produktif). Selain itu, secara makro adalah dengan menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian & pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggal.
- Kebijakan perlindungan sosial: (1) Satu data program perlindungan sosial; (2) Integrasi program perlindungan sosial; (3) Penyaluran bantuan sosial secara non tunai; (4)

Transformasi dari subsidi ke bantuan sosial; dan (5) Pendampingan sosial.

- Program keksejahteraan sosial di DIY: bantuan sosial pangan 317.436 KPM; program keluarga harapan (PKH) 390.514 PKM; dan system layanan dan rujukan terpadu (SLRT) 3 SLRT.
- Terdapat problematika penghitungan tingkat kemiskinan di DIY, karena penghitungannya menggunakan pendapatan pengeluaran. Sementara itu, masyarakat DIY cenderung hemat dalam berbelanja dan mengalokasikan pendapatannya untuk berinvestasi, misalnya ternak.
- Indeks kebahagiaan masyarakat DIY tinggi, yaitu 72,93 dan rata-rata nasional 70,69.
- Rancangan awal kegiatan prioritas tahun 2020 meliputi: (1) Penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta KPM; (2) Pelaksanaan bantuan pangan non tunai bagi 15,6 juta KPM; (3) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi 20.000 KK; (4) Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di 200 Kabupaten/Kota & 400 Puskesmas di Desa; (5) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi 101.800 KK; (6) Rehabilitasi bagi 25.000 Korban Penyalahgunaan Napza; (7) Penanganan dan Pemulihan Sosial bagi 150.000 Jiwa Korban Bencana Alam; (8) Pelayanan Kebutuhan bagi 120.000 jiwa Korban Bencana Sosial; (9) Pemberdayaan KAT bagi 2.500 KK; (10) Diklat entry & FDS bagi 10.600 pendamping PKH; (11) Diklat profesional bagi 8.000 konselor Adiksi & PSKS lain; (12) Akreditasi bagi 7.000 Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial; dan (13) DAK Fisik bidang Sosial.
- Menurunkan kemiskinan dapat ditempuh dengan: data, sinergi, fokus pada peningkatan produktivitas masyarakat miskin dan pendampingan.

c. Ketua Forum CSR DIY

- Terdapat sebanyak 3821 unit usaha di DIY yang berbadan hukum, namun sebagian besar merupakan usaha kecil.
- Hal-hal yang dikerjakan oleh forum CSR DIY adalah (1) mengajak Perusahaan untuk melakukan CSR; (2) mendorong Perusahaan agar mengalokasikan sebagian CSR-nya untuk membantu upaya penanggulangan kemiskinan; (3) membantu Perusahaan dalam menentukan calon penerima manfaat CSR; (4) membantu Perusahaan untuk memastikan bahwa CSR mereka tepat sasaran dan tepat guna; dan (5) membantu Perusahaan berkomunikasi dengan birokrasi dalam rangka pelaksanaan CSR
- Forum CSR membantu perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR, yaitu 20 persen dialokasikan untuk kehumasan, 20 charity dan 60 pemberdayaan, dengan sasaran pada 15

kecamatan untuk penanggulangan kemiskinan (mengacu pada RKPD

7. Tanggapan dan saran pada Pembukaan

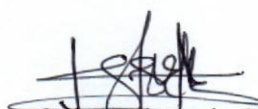
No.	Pertanyaan / tanggapan	Jawaban
1.	<p>a. Masyarakat miskin bukan hanya perlu dibantu tetapi juga diberdayakan. Pemberdayaan dalam bentuk usaha, membutuhkan modal, namun banyak masyarakat miskin yang belum bankable.</p> <p>b. Perlindungan usaha masyarakat miskin dari predator. Selain itu dengan memberikan dukungan yang mudah dilakukan oleh masyarakat miskin.</p> <p>c. Masyarakat yang masuk BDT mendapatkan semua bantuan, sementara itu ada masyarakat yang secara pendapatan tidak jauh berbeda namun tidak masuk dalam BDT, tidak mendapatkan satu pun bantuan.</p> <p>d. Untuk mendapatkan angka miskin yang menurun, penyaluran bantuan dipoolkan pada bulan Februari. Bukankah sebenarnya itu menipu diri sendiri.</p>	<p>BAPPENAS</p> <p>Kelompok predator memang mengganggu, menyebabkan gap harga sangat besar.</p> <p>Setuju untuk memberikan bantuan akses modal.</p> <p>KEMENSOS</p> <p>Kemiskinan adalah permasalahan yang komprehensif. Pendampingan adalah hal yang sering terlupakan.</p> <p>Data Kemensos semuanya berasal dari sensus.</p> <p>Kabupaten/kota yang mengetahui orang miskin atau tidak, Kemensos hanya memberikan prelist.</p> <p>Masyarakat yang termasuk dalam data BDT kelompok paling bawah dimungkinkan untuk mendapatkan semua bantuan.</p> <p>Terdapat mekanisme (kriteria) untuk menentukan apakah masyarakat masuk dalam BDT atau tidak.</p>
2.	<p>Titok Haryanto</p> <p>a. Pengalokasian CSR selain memperhatikan RPJMD sebaiknya memperhatikan RPJMDes, agar bisa mewadahi potensi-potensi di desa.</p> <p>b. Pembangunan dengan memperhatikan lingkungan hidup. Antisipasi kemacetan, sampah, banjir dan air di DIY.</p>	<p>BAPPENAS</p> <p>Setuju perihal antisipasi masalah macet dan air, apalagi ada perubahan fungsi wilayah di DIY.</p> <p>Rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 secara eksplisit menyebutkan terkait ketahaan air.</p> <p>FORUM CSR</p> <p>Forum CSR juga melakukan perubahan berkala, karena apabila</p>

No.	Pertanyaan / tanggapan	Jawaban
	<p>Banjir yang terjadi di Bantul sebagai akibat masifnya alihfungsi lahan di Sleman. Pembangunan saluran air dan transportasi public.</p>	<p>salah sasaran maka akan meningkatkan ketimpangan.</p> <p>Forum CSR tidak bisa melakukan asesmen ke bawah, sehingga dalam perencanaanya mengikuti perencanaan pemerintah.</p>
	<p>Suratno</p> <p>CSR untuk UKM sebaiknya melalui kelompok, agar tidak saling mematikan.</p>	<p>FORUM CSR</p> <p>Selama ini bantuan memang sudah melalui kelompok.</p>
	<p>Tanggapan/Pertanyaan dari Slido</p> <p>a. Sebenarnya bagaimana alur mengenai update data masyarakat miskin. agar kemudian yg sudah tidak/ memang tidak miskin tidak termasuk dalam data tersebut.</p> <p>b. Apakah kegiatan- kegiatan CSR oleh Forum CSR dapat didapatkan informasinya mengenai dimana dan oleh perusahaan apa?</p> <p>c. Orang jogja bukan ngirit saja pak kemensos. juga memang yang untuk dibelanjakan minimal.</p> <p>d. Strategi jitu untuk menurunkan angka kemiskinan yang seperti apa. mohon untuk langkah strategis bapak dari kemensos.</p> <p>e. Bagaimana mengakses data kemensos untuk dasar intervensi kegiatan dan sekaligus menurunkan angka kemiskinan.</p> <p>f. Sepakat pak pelaksanaan CSR tidak berbasis ring 1 tetapi juga menyuluruh di</p>	

No.	Pertanyaan / tanggapan	Jawaban
	<p><i>wilayah DIY.</i></p> <p><i>g. Kalau ingin fokus penanggulangan kemiskinan maka alokasi kemiskinan harus besar.</i></p> <p><i>h. Bappenas mohon mempunyai skema bertingkat baik di Pusat melaksanakan apa, di daerah melaksanakan apa terkait kemiskinan.</i></p> <p><i>i. Bgmn caranya menyatukan data2 khususnya untuk data yg diperlukan dalam rangka decision making di DIY, spt angka kemiskinan yg tdk sama antar kabupaten dg DIY.</i></p>	

Demikian notulensi ini disusun untuk dimanfaatkan.

Notulis


 Sri Mulyani, SE.

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD DIY

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
 Tanggal : 11 April 2019
 Tempat : Grand Ballroom Hotel Eastparc, Yogyakarta

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & No. Telp	Tanda Tangan
1	Nurrisatul Muziyah	Bappeda DIY	081915343490	1
2	Noviar Rahmad	Satpol PP DIY	081363369740	2
3	Neohy S.	Bappeda DIY	081328790348	3
4	Sumadi	Sleman		4
5	Eulung Iryanti	Dinas DIY	081320896263	5
6	Suranto MB	DEKOPIN WILAY	08174715452	6
7	AGUS L	BAPPEDA DIY	08132880011	7
8	ANJASWARI D	BKN	081390390594	8
9	SONYAPURI SATITI	PSKK UGM	081327676306	9
10	Malam V	Borobudur	087725893511	10
11	S. NINGR H	CANAL XGA	087738280062	11
12	Moko A	Ko PIWP2	08139263338	12
13	Rena MK	Biro Hukum	081390095297	13
14	Judieke H.S.	BPCB DIY	082196523475/NA	14
15	BAN BAMB M	Makur	081328035192	15
16	Henn P. Myreke	Kanwil DIB	08127153720	16
17	BILWAT P	BPKB DIY	08157925253	17
18	Ponian	BKD	08122758720	18
19	Mardiyono	POCDA DIY	081320267146	19
20	MARLUP Julia	Bappeda Jutent	087865337057	20
21	A. Fauzi	Kanwil Kemendagri	08122723258	21
22	M. Alod.	Ko TAKEM		22
23	Stamet Tulus W	Ka BPKPD DIY	082189015913	23
24	Haryanti	Sleman	0817277398	24
25	HARST	Bodante Sbang DIY	081804204870	25
26	Mr Miftahul Iqbal	BPK DIY	0821-1213.1038	26
27	ICANTO	Bappeda S/m		27
28	Sigit S	Piduker DIY		28
29	Harjo	D PKP DIY		29
30	Anisr	DP3 AP2	0818290291	30

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & No. Telp	Tanda Tangan
31	Fathoni	Bappeda	08564448800	31
32	P. S. S. HARTANA	Bappeda	08132802639	32
33	Sh. W	Bpa Bm		33
34	Imam B	Bappeda		34
35	Mang Yanti	Bappeda DIY		35
36	Antarkiso	Bappeda DIY		36
37	A. H. Herman K.	Pacangan DIY		37
38	Sri Wijayanti	Bappeda Kr		38
39	Kuswandi	Himpunan	0857404740	39
40	K. PRATIWI	RG PIWPZ	081392107271	40
41	Tri Mulyono	Stratifikasi	08157951662	41
42	IMYONAN SUKANTA	BMKG	08567528552	42
43	Arif Satrio	Kecel D/DB DIY		43
44	EDI YUSUF	UIN Suk	085602088588	44
45	R. Rulph HARI.	Kel. M.	081389006989	45
46	Arif H	DPP M	087771790520	46
47	Arif H	Dit. R.		47
48	Setyanto Ruro	ISI YK	08565568002	48
49	Agus	Dispar	08157951508	49
50	Het Woy	K. Tr	0851201145	50
51	Tung A.	Ass -	08132033000	51
52	Suharno	Rea Cukai	081392348337	52
53	K. R.	Bm RIN		53
54	A. Eko Heng's	PSPDR vsm	081390003980	54
55	Momika	DYAD DIY		55
56	Sri Nurhyetani	Biskop ukm	081392060821	56
57	Rustyawah	BERPOM DIY		57
58	Bayu	Dislansan	0816682261	58
59	Bambang Gurnawan	KPU DIY	081209444033	59
60				60

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & No. Telp	Tanda Tangan
61	Bunni S	LLDikti/Komisi Bunnijs		61
62	Herli A	Bappeda Kota		62
63	Ristyanah	Bupati Kota		63
64	Murhiwah	Bappeda	Bappeda	64
65	Isabella C	BPPSD		65
66	Ririn Helmi	BPPD	BPPSD	66
67	GAMAL R	BPKA		67
68	Jaka Pramono	Kanwil BPN		68
69	Setya Sasongko	Puspar UGM	0817467722	69
70	Tri Sakti	AS II	0813 2020 6000	70
71	Hendrat Hk	Bappeda	0812579040	71
72	Spek	Piro Bina Bener	0811206700	72
73	Wiyana	BRWS. Serayu opah	081578114600	73
74	Puji Astuti	Ro Mentul as	081804237551	74
75	Ani	BPKA	0816681180	75
76	Helmi J	SKDA BTL	081392499204	76
77	Drs. H. Siharsono	Bupati Bt.	08562553999	77
78	Pembangun	Diulces DIY	08222698016	78
79	Oktovianus, SH.MH	KEJATI DIY	081220855906	79
80	Wijaya Sabero	Jepeloro	08122956579	80
81	Sutanto	DLTK	08122717926	81
82	ZODDY	BAPPEDA	08122965638	82
83	Fauzan	Ban di. uet	081320113011	83
84	Rony Pn L	Kominfo DIY	0816680147	84
85	BAKUTIR	Bikoran Bn	081570016000	85
86	Alfran	Kulon Prose		86
87	Bay Sulu	Pamiradjo	081392869938	87
88				88
89				89
90				90

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & No. Telp	Tanda Tangan
91	YUYURI.	Bappeda	21-urip Sumanaharjo	91
92	RENI	m.	no 64.	92
93	Sriyati	Disnakertrans DIY	Ring road utara	93
94	Dwi Suci	Bappeda DIY		94
95	Pinkan M.P.	Bappeda		95
96	Novitrihu	BKIDN DIY		96
97	Siti's Mhm.	Janne Bmw		97
98	Siti A.	BPPSD		98
99	Dedan. R	Ro. Adun Perchesan	Kepatihan	99
100	SEPTIAN.	Kantor Kementanham dy		100
101	Dwi Endah C	BPPSD		101
102	M. Albonah	BKWS. So	Jl. Solo Km 6	102
103	Itat Prafatati	Biro UHP DIY	Kepatihan Daureh	103
104	Topoz m	Inspektorat Dwy	Youth Centre	104
105	Ludi	KSPK		105
106	Rahayu	BPPSD		106
107	Badingah, S.Sos	Bupati GK	Wonsari	107
108	Anis R	Disperdag y	Jl. Kuning	108
109	ISA BH	Bappeda Bantul		109
110	Winda Pangambuan	RMIT Lini	081351909080	110
111	Danang Setiadi	Panciro dya		111
112	Andi pras	Bappeda		112
113	Mei A.	Bappeda		113
114	Kusriatmi	BPS DIY	085228247300	114
115	Bima	Kab. Sleman.		115
116	Haryadi	Walikota		116
117	TIMUK AGUS N	Ro UHP		117
118	Bambang Riyanto	Ro UHP		118
119	Cahya Dams	Bappeda DIY		119
120				120